

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara Pulau Jawa sekaligus menjadi Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan wilayah geografisnya, Kota Semarang mempunyai batas-batas wilayah administratif, yakni sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal. Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar 373,78 km² atau 37.366,836 hektar (BPS Kota Semarang, 2024). Wilayah Kota Semarang memiliki keunikan dari segi topografinya dikarenakan terdiri atas 2 dataran, yaitu Kota Semarang Atas yang terdiri dari perbukitan dan Kota Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah mencakup 40% dari total luas kawasan. Sementara itu, untuk pusat pemerintahan seperti Kantor Gubernur dan Kantor Walikota terdapat di Kota Semarang Bawah.

2.1 Kondisi Demografi

Sebagai Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi salah satu kota paling berkembang, serta mempunyai peran strategis sebagai pusat di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kota Semarang tumbuh menjadi salah satu kota metropolitan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang begitu pesat, diiringi dengan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Dengan begitu, tidak heran bilamana Kota Semarang menjadi tujuan mobilitas masyarakat dengan angka

yang cukup tinggi, baik dalam aktivitas harian maupun perpindahan penduduk. Pertumbuhan tersebut tercermin pada mayoritas wilayah kecamatan mengalami kenaikan jumlah penduduknya dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kenaikan tersebut, seperti ketersediaan lapangan kerja, urbanisasi, serta aksesibilitas yang memadai sehingga turut serta menyokong lonjakan angka yang terjadi.

Berdasarkan pada data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan persentase sebaran penduduk, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Data Kependudukan Masyarakat Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	Sebaran Penduduk
1.	Mijen	56,52	89.948,00	1.591,35	5,31%
2.	Gunung Pati	58,27	100.752,00	1.729,00	5,94%
3.	Banyumanik	29,74	143.433,00	4.822,53	8,46%
4.	Gajah Mungkur	9,34	56.350,00	6.030,73	3,32%
5.	Semarang Selatan	5,95	62.179,00	10.456,73	3,67%
6.	Candisari	6,40	75.614,00	11.820,08	4,46%
7.	Tembalang	39,47	198.862,00	5.038,38	11,73%
8.	Pedurungan	21,11	196.526,00	9.309,77	11,60%
9.	Genuk	25,98	132.473,00	5.099,22	7,82%
10.	Gayamsari	6,22	70.409,00	11.319,94	4,15%
11.	Semarang Timur	5,42	66.481,00	12.261,64	3,92%

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	Sebaran Penduduk
12.	Semarang Utara	11,39	117.887,00	10.347,60	6,96%
13.	Semarang Tengah	5,17	55.213,00	10.672,11	3,26%
14.	Semarang Barat	21,68	149.326,00	6.888,8	8,81%
15.	Tugu	28,13	33.795,00	1.201,59	1,99%
16.	Ngaliyan	42,99	145.495,00	3.384,58	8,59%
Kota Semarang		373,78	1.694.743,00	4.534,07	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (diolah peneliti), 2023

Dari data tersebut, diketahui total penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 1.694.743 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 4.534,07 jiwa/km². Luas wilayah tertinggi terdapat di Kecamatan Gunungpati, sedangkan luas terkecil terdapat di Kecamatan Semarang Tengah. Pada tahun 2023, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tembalang yakni sejumlah 198.862 jiwa dengan persentase sebaran penduduk mencapai 11,73%, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Tugu yakni sejumlah 33.795 jiwa dengan persentase sebaran penduduk mencapai 1,99%. Data kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Semarang Timur yaitu sebesar 12.261,64 jiwa/km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Tugu yaitu 1.201,59 jiwa/km². Kepadatan penduduk merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah per satuan luas wilayah tersebut.

Data kependudukan yang tersedia dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan populasi seperti pada perencanaan pembangunan, kebijakan publik, analisis sosial, ekonomi, politik, dan pertimbangan di bidang lainnya. Data tersebut memuat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Semarang, yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin Tahun 2023		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Mijen	44876	45072	89948
Gunung Pati	50310	50442	100752
Banyumanik	70675	72758	143433
Gajah Mungkur	27602	28748	56350
Semarang Selatan	30215	31964	62179
Candisari	37302	38312	75614
Tembalang	98833	100029	198862
Pedurungan	97167	99359	196526
Genuk	66946	65527	132473
Gayamsari	34998	35411	70409
Semarang Timur	32261	34220	66481
Semarang Utara	58194	59693	117887
Semarang Tengah	26438	28775	55213
Semarang Barat	73311	76015	149326
Tugu	16906	16889	33795
Ngaliyan	72403	73092	145495
Kota Semarang	838437 (49,5%)	856306 (50,5%)	1694743 (100%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari data yang telah diperoleh dari BPS, diketahui jumlah penduduk tertinggi berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan berada di Kecamatan Tembalang. Sementara itu, data jumlah penduduk terendah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan terdapat di Kecamatan Tugu. Berdasarkan hasil data tertinggi dan terendah tersebut, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis ataupun kemudahan akses dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Kemudian terdapat data penduduk berdasarkan kelompok umur atau jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024) turut mempengaruhi adanya pembangunan wilayah Kota Semarang sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Tahun 2023)
0 - 4	114139
5 - 9	120325
10 - 14	124657
15 - 19	128960
20 - 24	129453
25 - 29	127625
30 - 34	130860
35 - 39	133310
40 - 44	135199
45 - 49	128500
50 - 54	113331
55 - 59	98848
60 - 64	81143

65 - 69	128393
70 - 74	-
75 +	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah peneliti), 2024

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Kota Semarang di atas menunjukkan adanya pembagian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dengan jumlah terbanyak berada pada kelompok umur 40-44 tahun, sedangkan jumlah terendah berada pada kelompok umur 60-64.

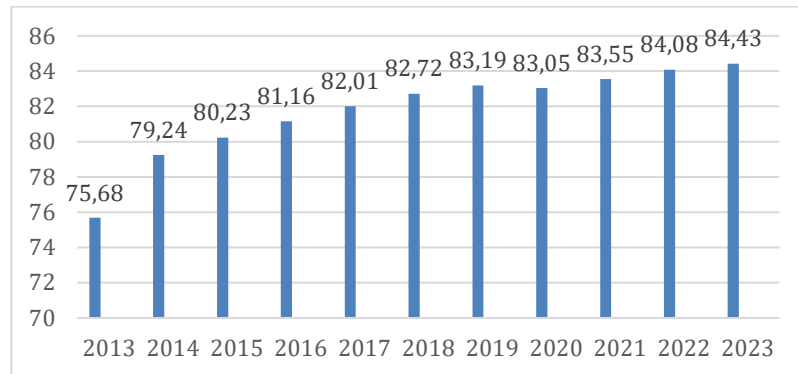
Untuk menjelaskan jumlah kelompok umur pada Generasi Z dengan kelahiran pada tahun 1997-2012, maka pada tahun 2023 berusia 11-26 tahun. Oleh karena itu, total penduduk Generasi Z di Kota Semarang terdapat sekitar 434 ribu jiwa.

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Selama satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kota Semarang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang meningkat dari 79,24 pada tahun 2013 menjadi 84,43 pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan IPM selama periode tersebut mencapai 0,71 persen per tahun, dengan status meningkat dari kategori "tinggi" menjadi "sangat tinggi" sejak tahun 2015. Namun, pandemi Covid-19 sempat memberikan dampak pada pencapaian pembangunan manusia di Kota Semarang. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 83,05, mengalami penurunan sebesar 0,17 persen dan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 0,57 persen. Meski begitu, lebih dari tiga tahun setelah pandemi

Covid-19 melanda, IPM Kota Semarang mulai pulih pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,42 persen.

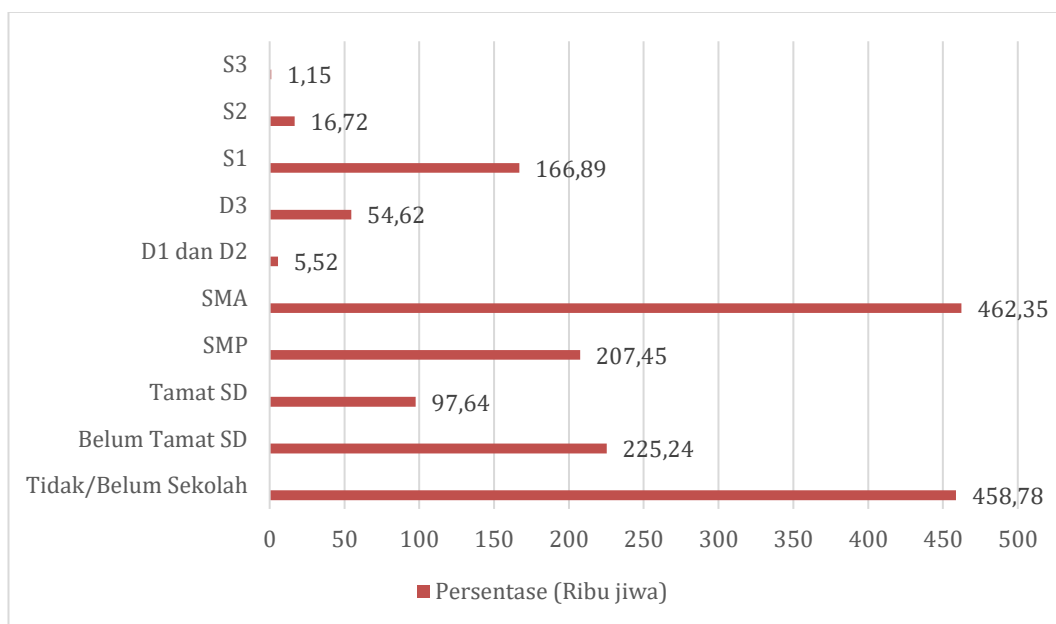
Gambar 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Capaian IPM tersebut memberi dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang yang didukung oleh komponen penyusun di dalamnya, yakni dari segi pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakatnya. Dikutip dari databooks.katadata, berikut sebaran jumlah pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Kota Semarang:

Gambar 2. 3 Persentase penduduk Kota Semarang Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: databooks.katadata.co.id,2024

Dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Semarang yang mencapai 1,6 juta jiwa pada tahun 2023, hanya terdapat sekitar 14,44% penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi. Bila dikonversi dalam bentuk persentase, maka penduduk yang menamatkan S3 terdapat 0,068%, S2 terdapat 0,99%, S1 terdapat 9,84%, D3 terdapat 54,62%, D1 dan D2 terdapat 0,33%. Sementara itu, penduduk yang menamatkan pendidikan SD terdapat 5,76%, SMP terdapat 12,23%, dan SMA terdapat 27,26%. Selain itu, untuk penduduk yang belum tamat SD ada 13,28, sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah menjadi angka tertinggi yakni 27,04%.

Dalam memperoleh kesejahteraan di bidang sosial dan ekonomi juga ditentukan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Kota Semarang, sebagaimana data dari BPS Kota Semarang tahun 2023 seperti berikut:

Tabel 2. 3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa) Tahun 2023

Status Pekerjaan	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1. Berusaha sendiri	104762	97235	201997
2. Berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	21636	24535	46171
3. Berusaha sendiri dibantu buruh tetap/dibayar	20006	10987	30993
4. Buruh/karyawan/pegawai	306155	222700	528855
5. Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	26119	3180	29299
6. Pekerja keluarga/tidak dibayar	11112	24931	36043
Jumlah Semua Status	489790	383568	873358

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang Tahun 2023

Merujuk pada data mengenai status pekerjaan, penduduk yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai mendominasi angkatan kerja di Kota Semarang dengan total 528.855 orang dengan persentase sebesar 60,55%. Data tersebut menunjukkan bahwa status pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu formal dan informal. Penduduk yang bekerja di sektor formal meliputi mereka yang menjalankan usaha dengan bantuan buruh tetap atau bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Sementara itu, sektor informal mencakup individu yang bekerja sendiri, menjalankan usaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, serta pekerja keluarga yang tidak menerima upah.

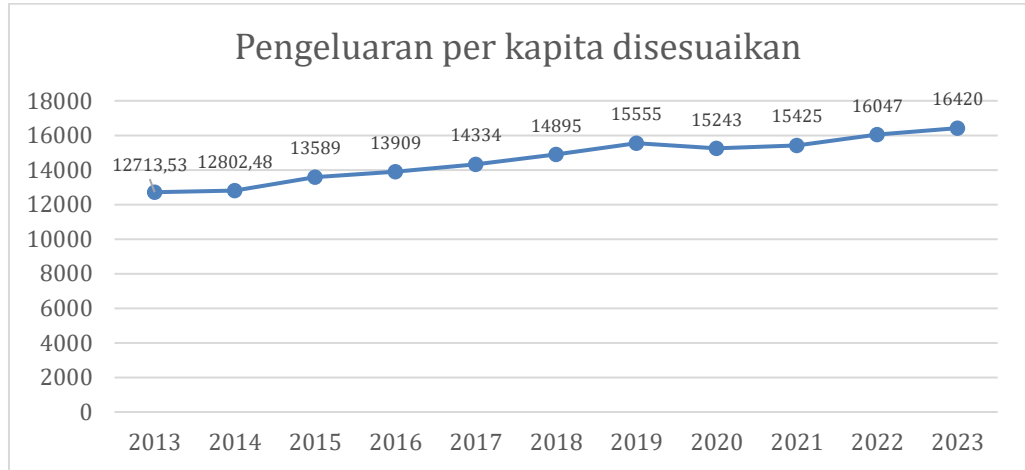
Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas mendorong peningkatan jumlah penduduk yang memilih berwirausaha. Perkembangan ini memberikan dampak positif, khususnya bagi usaha mandiri, karena teknologi

mempermudah proses pemasaran dan penjualan produk. Dengan demikian, wirausahawan lokal dapat lebih kompetitif di pasar yang lebih luas.

Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk menerima penghasilan berupa uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Penghasilan tersebut ditentukan dan diberikan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang upah Minimum pada 35 Kabupaten/ Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Sementara itu, untuk Kota Semarang mendapatkan UMK tertinggi yaitu sebesar Rp3.243.969. Penetapan UMK diluncurkan dengan mengacu pada inflasi di tingkat provinsi, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, serta besaran nilai alfa. Besaran UMK tersebut hanya diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun

Badan Pusat Statistik Kota Semarang juga mengeluarkan data pendukung dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari segi komponen berupa dimensi standar layak hidup. Dimensi tersebut menggambarkan kualitas kehidupan manusia, diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan jumlah biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan. Biaya ini mencakup pengeluaran dari pembelian, pemberian, atau hasil produksi sendiri, yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota dalam rumah tangga tersebut.

Gambar 2. 4 Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kota Semarang Tahun 2013-2023 (Rp 000)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data di atas, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Semarang semakin bertambah dari tahun 2013 hingga 2023 secara konsisten. Meski pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020, pengeluaran per kapita tetap bertahan di angka Rp15.243,00, menunjukkan dampak ekonomi yang terkendali di Kota Semarang. Setelah tahun 2020, pengeluaran per kapita kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, pengeluaran mencapai Rp16.047,00 , dan terus naik hingga Rp16.420,00 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang positif di Kota Semarang.

Perkembangan sosial ekonomi di Kota Semarang didukung dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang terus menunjukkan pertumbuhan, terutama di sektor perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makanan/minuman. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor jasa. Kondisi ini mencerminkan transformasi ekonomi

lokal yang semakin dinamis. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang meluncurkan program SIKER (Sistem Informasi Kerja) yang menjadi inovasi penting dalam mempermudah akses informasi bagi pencari kerja. Melalui platform ini, pencari kerja dapat menemukan lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka dan mengajukan lamaran secara daring, sehingga efisiensi dan keterjangkauan meningkat secara signifikan.

2.3 Kondisi Sosial Politik

Kota Semarang memiliki sistem pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Dalam struktur eksekutif, pemerintahan dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk masa jabatan 5 - Semarang yang beranggotakan 50 orang yang mewakili 6 daerah pemilihan. DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki alat kelengkapan yang terbagi dalam Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, serta beberapa komisi yang mengawasi bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan.

Dinamika politik di Kota Semarang tidak terlepas dari peran partai-partai politik. Partai politik yang mengikuti Pemilu di Kota Semarang terdapat 17 parpol, yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Hanura, Partai Garuda, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang No. 779 Tahun 2024 secara resmi menetapkan 50 calon legislatif yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Semarang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024. Dari total 18 partai politik yang mengikuti Pileg, terdapat 10 partai yang berhasil menduduki kursi DPRD Kota Semarang. Adapun hasil perolehan suara paling tinggi sampai paling rendah, diantaranya PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak yakni sejumlah 14 kursi, Gerindra 7 kursi, PKS dan Demokrat 6 kursi, PKB dan PSI 5 kursi, Golkar 4 kursi, kemudian Nasdem, PPP, dan PAN masing-masing 1 kursi.

Daftar calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan, diantaranya sebagai berikut:

Dapil 1

1. Trivena Weyatin Soehendro dengan suara sah 13.671
2. Michael dengan suara sah 5.928

Dapil 2

1. Hanik Khoiru Solikah dengan suara sah 10.218
2. Adi Subkhan Ifana dengan suara sah 7.820
3. Rahmulyo Adiwibowo dengan suara sah 7.491

Dapil 3

1. Lely Purwandari dengan suara sah 7.122
2. Bambang Sri Wibowo dengan suara sah 5.850

Dapil 4

1. Giyanto dengan suara sah 10.291
2. V. Djoko Riyanto dengan suara sah 9.172

3. Yosi Yonardo Garneda Rendra Putera dengan suara sah 5.915

Dapil 5

1. Kadar Lusman dengan suara sah 19.012
2. R. Yuwanto dengan suara sah 3.971

Dapil 6

1. Rukiyanto Arif Budiman dengan suara sah 9.364
2. Joko Susilo dengan suara sah 6.351

2.4 PDI Perjuangan Kota Semarang

Secara struktur organisasional, PDI Perjuangan Kota Semarang merupakan Cabang Partai Politik yang pusatnya berada di Jakarta. Partai Politik ini dikenal dengan lambang berbentuk gambar kepala banteng berwarna hitam dengan mata merah banteng dengan pandangan tajam melambangkan sikap waspada terhadap ancaman dalam setiap perjuangan, mulut putih pada banteng melambangkan sikap dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebajikan, dan warna merah yang menjadi warna dasar melambangkan keberanian dalam menghadapi risiko untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi masyarakat.

PDI Perjuangan memiliki visi dan misi sebagai organisasi politik, sebagai berikut:

a. Visi

Visi yang dimiliki oleh PDI Perjuangan didasarkan pada Pasal 6 AD/ ART, diantaranya:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi

Misi PDI Perjuangan merupakan segenap tugas dan harapan yang diemban oleh partai, serta menjadi dasar pemikiran dalam pelaksanaan

segala kebijakan. Misi tersebut termuat dalam Pasal 7,8,9, dan 10 AD/ART Partai, diantaranya:

Pasal 7, Partai memiliki tujuan umum:

- a. Mewujudkan cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8, Partai memiliki tujuan khusus:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan

material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;

- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9, Partai memiliki fungsi:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik;
- c. Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran

bung karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat pancasila;
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10, Partai memiliki tugas:

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;

- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

2.4 Struktur Kepengurusan DPC PDI-P Kota Semarang

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor: 25.04-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 tentang Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Hendrar Prihadi, S.E., M.M
Bidang Internal		
2.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos

NO	JABATAN	NAMA
3.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Paulus Sudaryanto, S.E
4.	Wakil Ketua Bidang Ideologi Dan Kaderisasi	I Gede Ananta Wijaya Putra, S.T., M.M.
5.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Dan Organisasi	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos
Bidang Pemerintahan		
6.	Wakil Ketua Bidang Politik	Fajar Adi Pamungkas, S.H.
7.	Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Perundang-Undangan	Fajar Rinawan Sitorus. S.H.
8.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian	Michael, S.Kom
9.	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan	Martinus Dwi Septianto. S.E.
Bidang Kerakyatan		
10.	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Kesehatan, Perempuan, Dan Anak	Lely Purwandari
11.	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi, Dan Umkm	Endang Retnawati, S.E.
12.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga	Catherine Anggraeny, S.E., Ak., CA., CPA
13.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan Dan Kepercayaan	H. Supriyadi, S.Sos

NO	JABATAN	NAMA
	Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	
14.	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, Dan Perikanan	R. Yuwanto
15.	Sekretaris	Kadarlusman
16.	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Wisda Pridatoe
17.	Wakil Sekretaris Bidang Program	Margono
18.	Bendahara	M. Rukiyanto A.B., S.H., M.A.
19.	Wakil Bendahara	Kristiani, S.Sos